

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kota Pariaman telah siap dalam implementasi sistem ERP dengan beberapa kekuatan dan hambatan yang dimiliki.
2. Pemerintah Kota Pariaman memiliki potensi sukses secara kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi sistem ERP karena lebih dari 83% (delapan puluh tiga persen) infrastruktur TIK dan pendukungnya dalam kondisi layak dan baik, dengan dukungan jaringan dan keamanan yang terencana. Namun terdapat masalah belum optimalnya saluran layanan, tidak adanya DRC dan tidak diakomodirnya beberapa pemeliharaan infrastruktur TIK dalam peraturan pelaksana di Pemerintah Kota Pariaman yang harus ditindak lanjuti segera agar tidak menghambat dalam implementasi sistem ERP nantinya.
3. Pemerintah Kota Pariaman memiliki potensi sukses secara kesiapan tingkat adopsi dalam implementasi sistem ERP karena didukung dengan adanya dokumen pengembangan TIK yang berkekuatan hukum, baik secara jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Namun terdapat masalah prosedur perencanaan yang masih belum konsisten penerapannya atau belum diotomatisasi, hal ini harus ditindak lanjuti segera agar implementasi sistem ERP dapat terwujud sesuai dengan perencanaan.

4. Pemerintah Kota Pariaman memiliki potensi sukses secara kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi sistem ERP karena adanya pemimpin yang dipercaya oleh ASN dan DPRD mampu melaksanakan proyek IT dengan baik. Namun terdapat masalah kurangnya personil dengan keterampilan TIK dan juga tidak dapat dimanfaatkannya ASN berlatar belakang komputer pada tempatnya sesuai Anjab yang harus ditindak lanjuti segera agar dapat mendukung suksesnya implementasi sistem ERP nantinya.

5. Pemerintah Kota Pariaman memiliki potensi sukses secara budaya organisasi dalam implementasi sistem ERP karena kesadaran akan kebutuhan teknologi yang tidak bisa dihindari serta budaya kepemimpinan yang baik dan memiliki wujud nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun terdapat masalah dalam budaya organisasi ini, yaitu keenganan untuk berubah dalam waktu dekat karena berada di zona nyaman atau ASN tersebut sulit menghilangkan kebiasaan penggunaan dokumen kertas yang diproses secara manual sehingga tidak melihat kebutuhan akan sistem yang baru. Sedangkan budaya toleransi untuk konflik dan risiko dinilai tidak tepat digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintahan daerah, karena kakunya aturan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak dapat disamakan dengan organisasi profit sehingga meskipun bernilai buruk hal ini tidak dapat dikatakan suatu kelemahan dalam budaya organisasi.

5.2. Saran

Dari temuan penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Kota Pariaman agar :

1. Untuk infrastruktur TIK, ada tiga hal yang menjadi perhatian, pertama perlu dibangunnya dokumen disaster recovery atau DRC untuk meminimalisir kerugian finansial dan non finansial dalam menghadapi kekacauan atau bencana alam. Kedua untuk saluran layanan berbasis web perlu untuk dioptimalkan dalam pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan lebih baik. Ketiga harus dilakukan revisi perwako tentang tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman agar mencakup anggaran pemeliharaan infrastruktur TIK dan pendukung TIK.
2. Untuk kesiapan tingkat adopsi sistem perlu disusunnya aturan perencanaan yang tegas dan memiliki sanksi terhadap pelanggarnya atau penggunaan sistem perencanaan agar setiap perencanaan terintegrasi setiap tahunnya dan menjalankan perencanaan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini harus didukung dengan dilakukannya tindakan menyamakan persepsi yang dapat diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman terhadap komitmen untuk mendukung implementasi sistem ERP yang dilakukan oleh tingkat atasan tertinggi hingga tingkat staf.
3. Untuk kesiapan sumber daya manusia perlu dilakukan penambahan SDM berlatar belakang pendidikan komputer sesuai analisa jabatan yang ada untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam implementasi sistem ERP nantinya, alternatif lain adalah melaksanakan pelatihan atau bimbingan

teknik perihal keterampilan TIK sehingga kekurangan SDM tersebut dapat diminimalisis dampaknya bagi implementasi sistem ERP.

4. Sedangkan untuk budaya organisasi disarankan untuk membuat peraturan yang memiliki sanksi atau bersifat memaksa ASN untuk menjalankan tata kelola pemerintahan dengan TIK, sehingga penggunaan sistem dalam tata kelola pemerintahan menjadi suatu keharusan.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap implemen tasi sistem ERP jika objek penelitiannya masih Pemerintah Kota Pariaman. Atau bagi peneliti berikutnya yang tertarik melakukan penelitian implemtasi sistem informasi khususnya sistem ERP pada Pemerintah Daerah lain atau Kementerian Lembaga, bisa mereplikasi penelitian ini

